

Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif Tunjang Pembangunan Daerah

Ditulis oleh hasan

Rabu, 09 May 2018 08:32 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 09 May 2018 08:33



Palu, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang diampu Biro Administrasi Otonomi Daerah menggelar workshop kolaborasi strategis eksekutif dan legislatif dalam membangun keunggulan daerah pada Selasa (8/5/2018) di hotel Sutan Raja.

Gubernur diwakili sekretaris daerah provinsi Drs. H Mohamad Hidayat Lamakarate, M Si menyatakan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan tersebut, dalam rangka mendorong peningkatan kolaborasi antara eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD).

Kolaborasi tersebut menurutnya adalah demi pembangunan dan peningkatan keunggulan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan. Usaha tersebut sejalan dengan visi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yakni, "Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing". Sekda Hidayat menambahkan, pada hakikatnya eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama, karena mereka yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif sama-sama dipilih oleh rakyat melalui proses yang demokratis. Dimana keduanya mengabdikan guna kesejahteraan rakyat.

"Meskipun fungsi berbeda, DPRD sebagai regulator, budgeting, dan controlling dan kepala daerah melaksanakan sebagai pelaksana perda dan kebijakan daerah. Eksekutif dan legislatif

Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif Tunjang Pembangunan Daerah

Ditulis oleh hasan

Rabu, 09 May 2018 08:32 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 09 May 2018 08:33

memiliki kedudukan yang sama sebagai “Mitra Seajar” dalam penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”, terangnya.

Akhirnya forum tersebut diharapkan untuk dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan melahirkan pokok-pokok pikiran strategis yang dapat menghantarkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Dan yang menjadi penting adalah, dapat menjawab tantangan hari ini dan esok. Sehingga potensi daerah tidak hanya bisa dinikmati hari ini saja, melainkan tetap sejahtera di masa mendatang.

Sejalan dengan yang disampaikan sebelumnya, kepala biro otonomi daerah Dra. Novalina, MM mengatakan bahwa kemitraan eksekutif dan legislatif menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi serta dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat.

Hal ini sambungnya, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana penyelenggaran pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Hal ini memberikan pemahaman bahwa DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan diberikan ruang yang seluas-luasnya menurut asas otonomi dan pembantuan.

Acara itu melibatkan unsur DPRD provinsi, kabupaten/kota, Sekda provinsi, kabupaten/kota, Asisten pemerintahan bidang hukum dan politik serta juga dari unsur organisasi perangkat daerah. Dan dipandu oleh Ryan Herviansyah Utama, SE., M Si., CHRP dan Asep Chaerollah, AT., MM., CHRP., CRM dari Sekretariat Dewan Integritas Nasional.{jcomments on}